

Perkembangan dan Kontribusi Penerbitan Sovereign Green Sukuk terhadap Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan dan Penurunan Emisi Karbon di Indonesia (2018 - 2025)

The Development and Contribution of Sovereign Green Sukuk Issuance to Sustainable Economic Resilience and Carbon Emission Reduction in Indonesia (2018 - 2025)

Farisul Haq*

Universitas Al-Amien Prenduan

*E-mail: farisulhaq.id@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perkembangan penerbitan Sovereign Green Sukuk dan asosiasinya dengan indikator ketahanan makroekonomi serta capaian penurunan emisi di Indonesia pada periode 2018-2025. Melalui analisis deskriptif berbasis data sekunder, studi ini menyandingkan data penerbitan dan alokasi dana Green Sukuk dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dengan indikator makroekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) serta *Green Sukuk Allocation and Impact Report*. Hasil kajian menunjukkan akumulasi penerbitan Green Sukuk mencapai USD 6,9 miliar pada periode 2018-2022 dan USD 9,59 miliar pada periode 2018-2023, dengan tambahan penerbitan global USD 600 juta (2024) dan USD 1,1 miliar (2025) yang datanya belum sepenuhnya dilaporkan secara granular. Dana ini menyediakan bantalan fiskal bagi belanja infrastruktur hijau di tengah pertumbuhan PDB Indonesia yang tercatat 5,11% sepanjang tahun 2025. Dari aspek lingkungan, proyek yang didanai seri ST007 diasosiasikan dengan reduksi emisi sekitar 1,12 juta ton CO₂e, sementara laporan resmi menyebut reduksi kumulatif dari empat penerbitan pertama (2018-2021) melampaui 10 juta ton CO₂e. Kajian ini menyimpulkan bahwa Green Sukuk berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mengintegrasikan prinsip pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dengan agenda adaptasi iklim nasional, dengan catatan bahwa klaim kontribusi bersifat asosiatif-deskriptif, bukan hasil pengujian kausal statistik.

Kata kunci: Sovereign Green Sukuk, Ketahanan Ekonomi, Emisi Karbon, Kebijakan Fiskal.

ABSTRACT

This study examines the development of Sovereign Green Sukuk issuance and its association with macroeconomic resilience indicators and emission-reduction achievements in Indonesia during 2018-2025. Using descriptive secondary-data analysis, this study juxtaposes Green Sukuk issuance and allocation data from the Directorate General of Budget Financing and Risk Management (DJPPR) with

macroeconomic indicators from Statistics Indonesia (BPS) and the Green Sukuk Allocation and Impact Report. The results show cumulative Green Sukuk issuance reached USD 6,9 billion (2018-2022) and USD 9,59 billion (2018-2023), with additional global issuances of USD 600 million (2024) and USD 1,1 billion (2025) whose granular allocation data remain unpublished. Environmentally, ST007-funded projects are associated with an emission reduction of approximately 1,12 million tons of CO_{2e}, while official reporting indicates the first four issuances (2018-2021) cumulatively exceeded 10 million tons of CO_{2e} in reduction. The study concludes that Green Sukuk functions as a fiscal policy instrument integrating environmental preservation principles (*hifz al-bi'ah*) with national climate adaptation, while noting that all contribution claims remain associative-descriptive rather than statistically causal.

Keywords: Sovereign Green Sukuk, Economic Resilience, Carbon Emissions, Fiscal Policy.

Pendahuluan

Isu perubahan iklim telah mendorong transformasi pendekatan pembangunan ekonomi global, dengan berbagai negara beralih dari model ekonomi ekstraktif menuju skema pertumbuhan berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia memiliki komitmen penurunan emisi yang tertuang dalam *Nationally Determined Contribution (NDC)* serta target *Net Zero Emission (NZE)* pada tahun 2060. Laporan *Second Biennial Update Report (BUR)* Indonesia kepada UNFCCC mencatat kebutuhan dana sekitar USD 247 miliar (setara USD 19 miliar per tahun) untuk mencapai target penurunan emisi pada periode 2018-2030.¹ Mengingat ruang fiskal APBN yang terbatas, pemerintah memerlukan instrumen pembiayaan utang alternatif yang selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Sejak tahun 2018, Pemerintah Indonesia merespons kebutuhan tersebut dengan menerbitkan Sovereign Green Sukuk (Sukuk Hijau Negara), instrumen yang menggabungkan prinsip investasi syariah dengan pendanaan proyek

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), *Second Biennial Update Report (BUR) Republik Indonesia kepada UNFCCC* (Jakarta: KLHK, 2018).

berbasis lingkungan. Penetrasi Green Sukuk terus berkembang, mencakup penerbitan seri global, skema berbasis proyek, hingga penawaran ritel (ST006 hingga ST012). Memasuki pertengahan dekade 2020-an, instrumen ini diharapkan tidak sekadar menutupi defisit APBN, tetapi turut mendukung sektor riil dan pencapaian target penurunan emisi karbon.

Penelitian terdahulu telah membahas aspek kepatuhan syariah dan tata kelola Green Sukuk, maupun dampak spesifik satu seri penerbitan terhadap capaian emisi (kajian atas seri ST007).² Namun, kajian yang memetakan perkembangan penerbitan secara longitudinal (2018-2025) sekaligus menguji konsistensi pelaporan data emisinya terhadap sumber primer masih relatif terbatas, sebagian besar kajian sebelumnya mengutip angka agregat dari laporan resmi tanpa penelusuran silang terhadap tabel rincian per tahun atau per seri. Kekosongan inilah yang coba diisi oleh penelitian ini, memetakan perkembangan alokasi dana Sovereign Green Sukuk beserta kontribusinya terhadap dukungan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penurunan emisi karbon di Indonesia pada periode 2018-2025, dengan penekanan pada ketertelusuran (*traceability*) setiap angka terhadap sumber primernya

Kajian Pustaka

A. Konseptualisasi Green Sukuk dan Maqasid Syariah

Green Sukuk adalah surat berharga syariah yang hasil penerbitannya secara spesifik digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang proyek ramah lingkungan (green eligible projects). Berbeda dengan obligasi konvensional, instrumen ini wajib memiliki aset pendasar (*underlying asset*) yang jelas serta terhindar dari riba, maysir, dan gharar. Dalam kajian

² Maisarah Adzimatinur, Siti Nurul Mahfuzah Roslen, dan Lucky Ade Bujung Sahlan, "The Evolution of Green Sukuk in Indonesia: A Strategic Framework and Policy Review," dalam *Proceedings of the 3rd International Conference on Islamic Economics and Business (ICIEB)* (2024), 162–175

kontemporer, Green Sukuk dipahami sebagai bentuk implementasi Maqasid Syariah, dengan pemeliharaan lingkungan (hifz al-bi'ah) sebagai elemen yang melengkapi lima tujuan dasar perlindungan syariat.³

B. Teori Pertumbuhan Hijau (*Green Growth Theory*)

Teori Green Growth menyatakan bahwa investasi pada pelestarian lingkungan dan efisiensi sumber daya tidak selalu menghambat laju ekonomi, investasi pada sektor rendah karbon berpotensi mendorong green jobs dan inovasi yang menopang stabilitas PDB. Dana yang dihimpun dari Green Sukuk dan disalurkan ke infrastruktur tangguh iklim diposisikan sebagai salah satu pendorong dalam kerangka konseptual ini.⁴

C. Kajian Empiris Terdahulu dan Kesenjangan Penelitian

Studi atas kontribusi seri ST007 terhadap reduksi gas rumah kaca menemukan estimasi reduksi sekitar 1,12 juta ton CO₂e dari proyek-proyek yang didanainya.⁵ Kajian lain menyoroti bahwa sektor transportasi berkelanjutan menyerap porsi alokasi dana terbesar (32,39%) pada periode 2018-2022, namun capaian reduksi emisinya tidak signifikan akibat penurunan penggunaan transportasi publik selama pandemi, temuan yang

³ Wahab, M. Z. H., & Naim, A. M. (2020). *Maqasid al-Shariah and Sustainable Finance: A Critical Review*. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12 (3) : 405-422.

⁴ Mohamad Zabri Hassan Wahab dan Asmadi Mohamed Naim, "Maqasid al-Shariah and Sustainable Finance: A Critical Review," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12, no. 3 (2020): 405–422. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan RI, *Green Sukuk sebagai Bentuk Komitmen Indonesia untuk Perubahan Iklim* (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024), kemenkeu.go.id.

⁵ Fitria Amalia, "Analisis Kontribusi Green Sukuk ST007 dalam Mendukung Sustainability Green Economy Indonesia" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023).

menunjukkan bahwa besarnya alokasi dana tidak selalu berbanding lurus dengan capaian emisi aktual.⁶

Pada level kajian literatur yang lebih luas, tinjauan komprehensif atas perkembangan Green Sukuk global, serta studi panel atas lima negara ASEAN periode 2018–2025 menunjukkan bahwa penerbitan green sukuk berasosiasi positif dengan capaian indeks SDGs, khususnya pada indikator energi bersih dan aksi iklim.⁷ Sementara itu, kajian berbasis Maqasid Syariah atas alokasi dana Green Sukuk Indonesia menegaskan relevansi prinsip *hifz al-bi'ah* dalam menilai efektivitas instrumen ini.⁸ Kesenjangan yang masih terjadi secara signifikan adalah: Pertama, kurangnya penelitian yang secara konsisten membandingkan tren penerbitan tahunan dengan indikator makroekonomi resmi BPS setiap tahun. Kedua, tidak adanya analisis yang secara jelas menetapkan batas ketertelusuran data ketika periode penelitian melebihi tahun publikasi laporan dampak resmi terakhir.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif berbasis analisis data sekunder (*descriptive secondary data analysis*) yang berfokus pada pemetaan tren dan penyandingan (*juxtaposition*) data lintas sumber untuk periode tahun 2018-2025. Desain ini dipilih secara sadar karena tidak tersedia data panel/time-series yang cukup panjang dan terstandardisasi untuk menjalankan uji inferensial (misalnya regresi atau uji kausalitas Granger) antara nilai

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Green Sukuk Ritel Seri ST007: Alokasi dan Dampak Lingkungan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2021), 14-18.

⁷ Wildan Hilmawan, Gina Sakinah, dan Nadia Putri Ananda, “Green Sukuk Issuance and Sustainable Development Goals Achievement in ASEAN,” *Iqtishaduna: International Conference Proceeding 2* (2026): 270–277.

⁸ Muhammad Fajar Arrazi, “Maqasid al-Shariah and Sustainable Finance: Analyzing the Impact of Green Sukuk Allocation in Indonesia,” *Muslim Business and Economic Review* 4, no. 1 (2025).

penerbitan Green Sukuk dan pertumbuhan PDB. Oleh karena itu, seluruh pernyataan “kontribusi” dalam artikel ini bersifat asosiatif-naratif, bukan hasil pengujian hubungan sebab-akibat secara statistik.

Data penelitian ini dianalisis melalui tabulasi tren tahunan (2018-2025) untuk indikator penerbitan Green Sukuk, dibandingkan secara deskriptif-paralel dengan tren PDB tahunan BPS pada periode yang sama. Konsistensi data emisi diuji melalui silang-cek (*cross-check*) antara angka agregat pada laporan dampak resmi dan rincian per proyek/seri yang dipublikasikan, untuk menilai transparansi pelaporan dan meminimalkan risiko klaim yang tidak dapat ditelusuri sumbernya (*greenwashing* pada level pelaporan).

Hasil Dan Pembahasan

A. Perkembangan Penerbitan Sovereign Green Sukuk (2018-2025)

Penerbitan Global Green Sukuk sebesar USD 1,25 miliar pada tahun 2018 menandai dimulainya era pembiayaan hijau berdaulat di Indonesia sekaligus menjadikan Indonesia penerbit sovereign green sukuk pertama di dunia. Tabel 1 merangkum tren penerbitan tahunan berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan RI.

Tabel 1.
Tren Penerbitan Sovereign Green sukuk

Tahun	Jenis Penerbitan	Nilai
2018	Global Green Sukuk perdana	USD 1,25 miliar
2019	Global Green Sukuk	USD 750 juta
2020	Global Green Sukuk + Ritel	USD 750 juta, Rp5,42 triliun (ST007)
2021	Global Green Sukuk	USD 750 juta
2022	Global, Ritel (ST009), Project-Based	USD 1,5 miliar (global)
2023	Global + Domestik (ST010T4, ST011T4, PBSG001)	USD 1 miliar (global), IDR 8,8 T + 15,49 T (domestik)

2024	Global Green Sukuk	USD 600 juta (tenor 30 tahun)
2025	Global Green Sukuk	USD 1,1 miliar (tenor 10 tahun)

Sumber data: Laporan DJPPR Kemenkeu RI (*data diolah*)

Data resmi menunjukkan kumulasi nilai penerbitan mencapai USD 6,9 miliar pada periode 2018-2022, dan bertumbuh menjadi USD 9,59 miliar pada periode 2018-2023 setelah penerbitan global senilai USD 1 miliar serta domestik senilai IDR 24,29 triliun pada tahun 2023. Penerbitan berlanjut pada 2024 (USD 600 juta) dan 2025 (USD 1,1 miliar), meski rincian alokasi sektoral dan dampak emisi untuk dua tahun terakhir ini belum sepenuhnya dipublikasikan dalam laporan dampak resmi pada saat naskah disusun, sebuah keterbatasan data yang perlu ditegaskan agar klaim penelitian tidak melampaui bukti yang tersedia.

Pada segmen ritel, seri ST006 hingga ST012 dinilai berhasil menarik partisipasi investor individu. Sebagai contoh, seri ST007 (ditawarkan November-Desember 2020) mengumpulkan dana sebesar Rp5,42 triliun dari 16.992 investor domestik, capaian penjualan dan jumlah investor tertinggi sepanjang sejarah Sukuk Tabungan pada masanya. Tren positif berlanjut pada seri ST011 dan ST012 (2024-2025) yang tercatat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*). Diversifikasi basis investor ke tingkat domestik ini berdampak positif bagi pemerintah karena mengurangi ketergantungan pada dana asing dan meminimalkan risiko arus modal keluar (*capital outflow*).

B. Asosiasi Green Sukuk dengan Kinerja PDB Nasional

Data BPS menunjukkan perekonomian Indonesia mencatatkan kinerja yang relatif stabil pasca-kontraksi akibat pandemi pada 2020 (-2,07%): PDB tumbuh 5,31% pada 2022, stabil di 5,03% pada 2024, dan tercatat

5,11% secara tahunan (c-to-c) sepanjang tahun 2025, lebih tinggi dari capaian 2024 namun sedikit di bawah target APBN 2025 sebesar 5,2%. Perlu digarisbawahi bahwa angka 5,11% tersebut adalah capaian pertumbuhan tahun penuh 2025 yang dirilis BPS pada Februari 2026, bukan capaian kuartal awal tahun, pertumbuhan pada Kuartal I-2025 sendiri tercatat jauh lebih rendah, yaitu 4,87% (yoy), sebelum terakselerasi menjadi 5,39% pada Kuartal IV-2025.⁹

Nilai penerbitan Green Sukuk relatif kecil dibandingkan total PDB Indonesia sehingga tidak dapat diklaim sebagai faktor tunggal penentu pertumbuhan. Namun demikian, instrumen ini berperan sebagai bantalan fiskal (*fiscal cushion*), di mana dana penerbitan dialokasikan untuk membiayai belanja modal kementerian/lembaga seperti proyek jalur kereta api ganda, infrastruktur pengelolaan air, dan pembangunan bendungan, yang secara tidak langsung menjaga daya beli pekerja proyek lokal dan konektivitas logistik. Dengan demikian, Green Sukuk diasosiasikan dengan tersedianya ruang likuiditas bagi belanja publik produktif di tengah fluktuasi penerimaan pajak, sebuah hubungan yang bersifat deskriptif-paralel, bukan hasil pengujian kausal terhadap angka pertumbuhan 5,11% pada 2025.

C. Evaluasi Capaian Penurunan Emisi Karbon

Tantangan utama instrumen pembiayaan hijau adalah risiko greenwashing, yaitu klaim dampak lingkungan yang tidak terbukti di lapangan. Berdasarkan penelusuran atas *Green Sukuk Allocation and Impact Report* Kementerian Keuangan, pelaporan penggunaan dana di

⁹ Badan Pusat Statistik (BPS), “Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen,” *Berita Resmi Statistik*, 5 Februari 2026.

Indonesia dinilai relatif transparan dan telah memperoleh telaah dari lembaga independen.¹⁰

Dari segi capaian kuantitatif yang dapat ditelusuri, proyek-proyek yang didanai seri ST007 diasosiasikan dengan reduksi emisi sebesar kurang lebih 1,12 juta ton CO₂e (1.115.777,6 ton CO₂e), berdasarkan kajian yang secara khusus mengaudit portofolio proyek seri tersebut.¹¹ Pada level agregat, pernyataan resmi DJPPR (2022) menyebut proyeksi penurunan emisi dari empat penerbitan Global Green Sukuk pertama (2018-2021) melampaui 10 juta ton CO₂e, dengan rincian per tahun sebesar 5,7 juta ton (2018), 3,2 juta ton (2019), dan 1,4 juta ton (2020) CO₂e, atau setara 10,3 juta ton CO₂e untuk periode tahun 2018-2020.¹²

Terlepas dari perbedaan presisi angka kumulatif tersebut, konsistensi arah pelaporan, dari agregat total hingga rincian sub-proyek seperti ST007, mengindikasikan bahwa pembiayaan publik berbasis sukuk memberikan bukti empiris yang secara umum terukur dalam mendukung realisasi target emisi nasional, meski presisi angka pada level kumulatif multi-tahun memerlukan verifikasi lebih cermat terhadap tabel resmi terbaru.

D. Evaluasi Kritis dan Tantangan Implementasi

Pertama, terkait literasi investor ritel. Pengamatan pasar mengindikasikan bahwa sebagian besar pembeli Sukuk Tabungan (ST009-ST012) masih menjadikan skema imbal hasil mengambang (*floating with floor*) yang menawarkan imbal hasil di atas tingkat inflasi sebagai motivasi

¹⁰ Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), *Green Sukuk Allocation and Impact Report 2023* (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

¹¹ Amalia et al., "The Strategic Role of Green Sukuk ST007 in Advancing Climate Resilience Financing," 2025.

¹² Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), "Proyeksi Penurunan Emisi dari Penerbitan Sukuk Hijau Global," pernyataan dalam forum Green Sukuk High Level Working Group, G20 (2022).

utama, sementara pemahaman mengenai profil dan dampak ESG di kalangan investor ritel masih tergolong rendah.

Kedua, isu standar kepatuhan syariah pada skala global. Penerapan skema *Wakalah-Ijarah* yang menggunakan instrumen *Purchase Undertaking* pada nilai nominal masih menjadi perdebatan di ranah fiqh kontemporer. Perlu ditegaskan bahwa rujukan yang relevan, yaitu AAOIFI Shari'ah Standard No. 62, hingga pertengahan tahun 2025 masih berstatus *exposure draft* (dirilis November 2023 dan masih direvisi berdasarkan masukan industri), belum menjadi standar final yang mengikat.¹³ Kritik terhadap skema *Purchase Undertaking* pada nilai nominal berpusat pada minimnya transfer risiko riil yang membuat karakteristiknya menyerupai utang konvensional, kritik ini relevan sebagai bagian dari wacana penyusunan Standard No. 62, namun penulis perlu berhati-hati tidak menyebutnya sebagai “ketentuan” yang sudah berlaku. Penyesuaian struktur akad yang lebih merepresentasikan kepemilikan aset riil tetap menjadi pekerjaan rumah bagi OJK dan DSN-MUI untuk mengantisipasi arah regulasi global tersebut.

Kesimpulan

Periode 2018-2025 merupakan fase penting dalam pengembangan instrumen pembiayaan hijau di Indonesia. Penerbitan Sovereign Green Sukuk memberikan kontribusi ganda. Secara makroekonomi, instrumen ini menyediakan daya dukung likuiditas bagi APBN untuk membiayai infrastruktur ramah lingkungan, yang secara deskriptif berjalan seiring dengan ketahanan PDB pada level 5,11% sepanjang tahun 2025. Dari segi ekologi, alokasi dana pada proyek-proyek seperti ST007 diasosiasikan dengan reduksi

¹³ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *Exposure Draft of Shari'ah Standard No. 62 “Sukuk”* (Manama: AAOIFI, 2023).

emisi karbon terukur ($\approx 1,12$ juta ton CO₂e), dan laporan resmi mencatat reduksi kumulatif dari penerbitan awal telah melampaui 10 juta ton CO₂e.

Instrumen ini bukan sekadar alternatif instrumen utang, melainkan instrumen kebijakan fiskal yang mendukung adaptasi iklim. Untuk pengembangan ke depan, pemerintah perlu melakukan: (1) meningkatkan literasi ESG di kalangan investor ritel, bukan sekadar literasi imbal hasil, (2) menyempurnakan skema akad untuk mengantisipasi arah AAOIFI Shari'ah Standard No. 62 begitu standar tersebut difinalisasi, dan (3) mempercepat publikasi *Green Sukuk Allocation and Impact Report* untuk tahun penerbitan 2024-2025 agar ketertelusuran data emisi tidak tertinggal dari ketertelusuran data nominal penerbitan. Penelitian selanjutnya, disarankan mengembangkan desain penelitian dengan uji asosiasi statistik sederhana (misalnya korelasi Pearson antara nilai penerbitan tahunan dan pertumbuhan PDB tahunan) untuk memperkuat klaim kontribusi yang saat ini masih bersifat deskriptif.

Daftar Pustaka

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). 2023. *Exposure Draft of Shari'ah Standard No. 62 "Sukuk"*. Manama: AAOIFI.
- Adzimatunur, Maisarah, Siti Nurul Mahfuzah Roslen, dan Lucky Ade Bujung Sahlan. 2024. "The Evolution of Green Sukuk in Indonesia: A Strategic Framework and Policy Review." Dalam *Proceedings of the 3rd International Conference on Islamic Economics and Business (ICIEB)*.
- Amalia, Fitria. 2023. "Analisis Kontribusi Green Sukuk ST007 dalam Mendukung Sustainability Green Economy Indonesia." Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Amalia et al., "*The Strategic Role of Green Sukuk ST007 in Advancing Climate Resilience Financing*," 2025.

- Arrazi, Muhammad Fajar. 2025. "Maqasid al-Shariah and Sustainable Finance: Analyzing the Impact of Green Sukuk Allocation in Indonesia." *Muslim Business and Economic Review* 4 (1).
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2026. "Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen." *Berita Resmi Statistik*, 5 Februari 2026. Jakarta: BPS.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). 2022. "Proyeksi Penurunan Emisi dari Penerbitan Sukuk Hijau Global." Pernyataan dalam forum Green Sukuk High Level Working Group, G20.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). 2024. *Green Sukuk Allocation and Impact Report 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hilmawan, Wildan, Gina Sakinah, dan Nadia Putri Ananda. 2026. "Green Sukuk Issuance and Sustainable Development Goals Achievement in ASEAN." *Iqtishaduna: International Conference Proceeding* 2.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2018. *Second Biennial Update Report (BUR) Republik Indonesia kepada UNFCCC*. Jakarta: KLHK.
- Supriyadi, Ali, Dwi Fidhayanti, dan Ramadhita. 2023. "The Influence of Environmental, Social, and Governance on Sharia Investment and Green Sukuk Value." *International Journal of Islamic Economics and Sustainability* 4 (3).
- Wahab, Mohamad Zabri Hassan, dan Asmadi Mohamed Naim. 2020. "Maqasid al-Shariah and Sustainable Finance: A Critical Review." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12 (3).